



**RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022 sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Rencana Kerja ini berisi perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang diharapkan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019 - 2024. Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. LIZA DERNI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19680812 199903 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 dan Capaian Renja Terhadap Renstra.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan.....	25
2.3 Isu – isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan	30
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	22 31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	34 37
3.3 Rumusan Program dan Kegiatan	39
BAB IV. RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022	48
BAB V. PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran adalah suatu proses yang melibatkan unit perencana dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Strategia (Renstra), berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan menentukan kebijakan, program dan kegiatan melalui tahapan-tahapan yang merupakan siklus tahunan agar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu, efisien, efektif, dan akuntabel. Dalam rangka menjembatani dan memfasilitasi pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung perlu menyusun Rencana Kerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan pergub lampung nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan Pergub

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas, yaitu :

1. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan *eradikasi* penyakit ikan di darat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

(Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 56 Tahun 2019, Tanggal: 25 November 2019)

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Sub Koordinator),
(JF.Perencana Ahli Muda, Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan)
 - d. Jabatan Pelaksana
- 3) Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Sub Koordinator):
 - JF.Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Tata Ruang Laut)
 - JF.Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Jasa Kelautan, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)
 - JF.Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut)
 - b. Jabatan Pelaksana
- 4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Sub Koordinator):
 - JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Sumber Daya Ikan)
 - JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan)
 - JF. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan)

- b. Jabatan Pelaksana
- 5) Bidang Perikanan Budidaya Dan Penguatan Daya Saing membawahi :
- a. Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Sub Koordinator):
- JF. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya)
 - JF. Pengelola Kesehatan Ikan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan)
 - JF. Analis Pasar Hasil Perikanan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Penguatan Daya Saing)
- b. Jabatan Pelaksana
- 6) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
- a. Jabatan Fungsional Jenjang Muda (Sub Koordinator):
- JF. Pengawas Perikanan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan)
 - JF. Pengawas Perikanan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan)
 - JF. Pengawas Perikanan Muda (Sub Koordinator Sub Substansi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum)
- b. Jabatan Pelaksana
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari :
- 1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pengujian dan Monitoring;
 - c) Seksi Pengembangan Hasil Perikanan;
 - 2) UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau
 - a) Sub Bagian Usaha;
 - b) Seksi Pelayanan dan Pengendalian Mutu Perbenihan;
 - c) Seksi Sarana dan Produksi.
 - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha

- b) Seksi Pengusahaan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana
- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas :
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai;
 - c) Seksi Pelabuhan Perikanan Pantai Teladas.
- 5) UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung :
- a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengusahaan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- 8). Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2022 adalah :

1. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
2. Sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam mencapai tujuan dalam 1 (satu) tahun kedepan;
3. Sebagai dasar bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan lembaga pemerintah lain, khususnya bagi lembaga non-pemerintah;
4. Sumber informasi bagi para pelaku kegiatan dalam internal Dinas Kelautan dan Perikanan, serta *stakeholders*, baik di pusat maupun daerah, tentang kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Mempercepat proses dan kualitas pencapaian hasil yang telah direncanakan;
3. Panduan prioritas kegiatan-kegiatan organisasi yang berorientasi kepada visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renja Terhadap Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DKP
- 3.3. Rumusan Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DKP TAHUN 2022

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2020

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dilakukan secara periodik melalui evaluasi renja yang dilakukan setiap triwulan. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 tergambar dalam capaian renja pada Triwulan ke IV tahun 2020 sebagaimana Tabel berikut:

**LAPORAN REALIASASI KEUANGAN DAN CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TA 2020
TRIWULAN IV 2020**

STATUS: s.d TRIWULAN IV 2020

No	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN				SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN				MASALAH	TINDAK LANJUT
			PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	SISA (Rp.)			SATUAN	TARGET	REALISASI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.01.01.001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	434.364.760,00	388.085.721,00	89,34	46.279.039,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi , sumber daya air dan listrik	Persen	100	100	100		
2	03.01.01.002	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.007.907.940,00	896.196.126,00	88,91	111.711.814,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100	100	100		
3	03.01.01.004	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100	0,00	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan perbaikan peralatan kerja	Unit	60	60	100		
4	03.01.01.005	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.250.000,00	16.249.800,00	99,99	200,00	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK	Buah	50	50	100		

5	03.01.01.006	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.337.500,00	19.172.500,00	99,14	165.000,00	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Peggandaan	Buah	50	50	100		
6	03.01.01.007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.349.375,00	41.574.880,00	95,90	1.774.495,00	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Buah	50	50	100		
7	03.01.01.008	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	12.124.815,00	11.790.350,00	97,24	334.465,00	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Buah	20	20	100		
8	03.01.01.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.850.000,00	99	150.000,00	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	20	20	100		
9	03.01.01.010	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.250.000,00	14.635.000,00	90,06	1.615.000,00	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makanan dan Minuman	Kali	360	360	100		
10	03.01.01.011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	786.642.165,00	658.879.721,00	83,75	127.762.444,00	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi	Kali	50	50	100		
11	03.01.01.013	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	1.360.890.000,00	1.356.624.000,00	99,68	4.266.000,00	Terlaksananya Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL	Orang	42	42	100		

12	03.01.02.001	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0,00	0	0,00	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit	1	0	0		
13	03.01.02.002	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.522.000,00	24.803.090,00	0	1.718.910,00	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	10	10	100		
14	03.01.02.003	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00	236.522.000,00	94,60	13.478.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Unit	1	1	100		
15	03.01.02.004	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000,00	149.944.291,00	99,96	55.709,00	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	30	30	100		
16	03.01.02.005	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.140.000,00	6.240.000,00	24,82	18.900.000,00	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	5	5	100		
17	03.01.03.001	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	0	0,00	0	0,00	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi	Orang	120	0	0		

18	03.01.04.001	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	57.225.000,00	56.182.000,00	98,17	1.043.000,00	Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	Dokumen	6	6	100		
19	03.01.04.002	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	18.042.700,00	18.042.600,00	99,99	100,00	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	Dokumen	1	1	100		
20	03.01.04.003	Penyusunan dokumen perencanaan	22.185.130,00	14.034.000,00	63,25	8.151.130,00	Terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP)	Dokumen	5	5	100		

21	03.01.04.004	Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	0	0	0	0,00	Terlaksananya Pengembangan E-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi e-Government dan Pameran	Kegiatan	2	0	0		
22	03.01.04.005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	0	0	0	0,00	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Dokumen	1	0	0		
23	03.01.17.001	Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	6.022.900,00	6.018.200,00	99,92	4.700,00	Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi	Unit	45	45	100		
24	03.01.17.002	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	14.877.000,00	14.872.000,00	99,96	5.000,00	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	Jumlah pokmaswas yang dibina	Kelompok	18	18	100		
25	03.01.17.003	Penanganan pelanggaran pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	11.542.000,00	11.542.000,00	100	0,00	Terlaksananya Penanganan pelanggaran pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase tertanganin ya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	Kab./kota	10	10	100		

26	03.01.17.004	Penyediaan operasional patroli laut dan pemeliharaan kapal pengawasan	181.323.980,00	181.265.200,00	99,96	58.780,00	Terlaksananya P enyediaan operasional patroli laut dan pemeliharaan kapal pengawasan	Tersediany a Operasiona l Kapal Pengawasa n mendukung patroli laut	Unit	2	2	100		
27	03.01.17.006	Penyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	42.320.290,00	42.319.900,00	99,99	390,00	Terlaksananya P enyediaan Sarana Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana prasarana Pengawasa n Sumberday a Kelautan dan Perikanan yang disediakan	Paket	5	5	100		
28	03.01.20.001	Pembinaan, fasilitasi usaha kelompok pembudidaya ikan	0	0	0	0,00	Terlaksananya P embinaan, fasilitasi usaha kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kelompok pembudida ya ikan yang dibina (kelompok)	Kelompok	60	0	0		
29	03.01.20.002	Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan	44.140.600,00	40.040.600	90,71	4.100.000,00	Terlaksananya P eningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan	Jumlah pembudida ya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudid aya)	Kelompok	60	45	75		
30	03.01.20.003	Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan	527.489.800,00	526.800.800	99,86	689.000,00	Terlaksananya P engembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Paket	20	20	100		

		prasarana bagi pembudidaya ikan					sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan							
31	03.01.20.004	Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	21.686.600,00	21.686.600,00	100	0,00	Terlaksananya Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta pendampingan audit	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	Kegiatan	15	15	100	Masih kurangnya pengetahuan dan wawasan para pembudidaya di beberapa daerah tentang pakan dan obat yang boleh digunakan dalam budidaya ikan/udang (sudah terregistrasi KKP RI)	Melakukan kegiatan sosialisasi pakan dan obat ikan yang baik digunakan untuk budidaya ikan/ udang kepada para pembudidaya ikan/udang
32	03.01.20.005	Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	457.592.800,00	454.808.300,00	99,39	2.784.500,00	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan	Paket	30	57	190		
33	03.01.20.006	Operasional Kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan	212.733.800,00	210.692.632,00	99,04	2.041.168,00	Terlaksananya Operasional Kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dibiayai operasionalnya	UPTD	1	1	100		

34	03.01.21.001	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	444.600.000,00	441.389.000,00	99,27	3.211.000,00	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Jumlah PUD yang dikelola dan lokasi inventarisasi potensi sumberdaya ikan	Kab./kota	5	5	100		
35	03.01.21.003	Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	0	0	0	0,00	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana nelayan	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang memenuhi standar (paket)	Paket	10	0	0		
36	03.01.21.004	Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	21.228.000,00	20.226.000,00	95,28	1.002.000,00	Terlaksananya Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan	Jumlah kapal perikanan yang didaftarkan dan memiliki tanda kapal (unit)	Unit	100	100	100		
37	03.01.21.005	Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	15.260.000,00	14.945.200,00	97,93	314.800,00	Terlaksananya Pembinaan dan monitoring program kenelayanan	Jumlah pembinaan dan monitoring yang dilaksanakan(kegiatan)	Kegiatan	30	30	100		

38	03.01.21.006	Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya	340.346.000,00	324.580.000,00	95,36	15.766.000,00	Terlaksananya Peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	Orang	1450	1450	100		
39	03.01.21.007	Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	27.021.000,00	25.801.500,00	95,48	1.219.500,00	Terlaksananya Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	Orang	200	244	122		
40	03.01.21.008	Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	1.164.706.000,00	1.022.616.855	87,8	142.089.145,00	Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Provinsi Lampung	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarananya (pelabuhan)	Lokasi	3	3	100		
41	03.01.21.009	Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan SHTI di pelabuhan perikanan	29.474.040,00	27.410.750,00	93	2.063.290,00	Terlaksananya Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan SHTI di pelabuhan perikanan	Jumlah lokasi Pelayanan Kesyahbandaran dan Penerbitan SHTI di Pelabuhan Perikanan (pelabuhan)	Lokasi	3	3	100		

42	03.01.21.010	Pembinaan dan pendampingan CPIB di Pelabuhan dan TPI Hygienis	59.283.000,00	57.629.000,00	97,21	1.654.000,00	Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan CPIB di Pelabuhan dan TPI Hygienis	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	Lokasi	9	9	100		
43	03.01.21.011	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	711.451.550,00	700.246.303,00	98,42	11.205.247,00	Terlaksananya Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	Lokasi	1	1	100		
44	03.01.21.012	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	394.177.305,00	375.629.626,00	95,29	18.547.679,00	Terlaksananya Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	Lokasi	2	2	100		
45	03.01.21.013	Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	601.807.265,00	588.809.100,00	97,84	12.998.165,00	Terlaksananya Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	Lokasi	1	1	100		
46	03.01.21.014	Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	39.388.200,00	35.539.560,00	90,22	3.848.640,00	Terlaksananya Pengelolaan Rajungan Berkelanjutan	Jumlah lokasi program Komite pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan (KPPRB) yang dikelola	Kab./kota	3	3	100		

47	03.01.25.001	Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	76.201.590,00	75.987.500	99,71	214.090,00	Terlaksananya Peningkatan Konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah sasaran/pe serta yang menerima pemberian makanan tambahan berbahan ikan	Orang	750,00	750	100		
48	03.01.25.002	Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	24.620.070,00	19.418.550	78,87	5.201.520,00	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan kompetensi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi/ meningkat kompetensinya	Orang	30	30	100		
49	03.01.25.003	Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	480.000.000,00	475.969.000	99,16	4.031.000,00	Terlaksananya Pengembangan sentra pengolahan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok pengolah dan pemasar	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan	Paket	3	3	100		
50	03.01.25.004	Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	38.458.775,00	37.727.500,00	98,099	731.275,00	Terlaksananya Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	Dokumen	2	2	100		

51	03.01.26.001	Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	63.301.300,00	51.078.437,00	80,69	12.222.863,00	Terlaksananya Pengembangan produk dan standarisasi hasil perikanan	Jumlah produk, UMKM, UPI dan unit budidaya yang sesuai standar	Unit	30	44	146,66	Pembatasan perjalanan dinas dalam daerah karena adanya recofusing anggaran untuk pandemi menyebabkan kegiatan, pembinaan ke unit budidaya tidak optimal, sehingga target tidak tercapai	Berkoordinasi dengan Tim Monres bidang Budidaya DKP Prov.Lampung untuk meminta data hasil monres pembudidaya untuk program mendatang
52	03.01.26.002	Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu Sampai Hilir	66.883.176,00	66.836.100,00	99,93	47.076,00	Terlaksananya Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu Sampai Hilir	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	Sampel	300	571	190,33	Minimnya anggaran pengadaan media regensia dan peralatan pengujian, menyebabkan jumlah pengujian sampel tidak banyak yang bisa diujikan di laboratorium	Mengajukan anggaran pengadaan media dan regensia pada tahun 2021 untuk pengujian yang lebih banyak

53	03.01.27.001	Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	383.868.000,00	318.483.460,00	82,96	65.384.540,00	Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Tata Ruang Laut	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan	Dokumen	4	4	100		
54	03.01.26.003	Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	387.646.920,00	372.716.061,00	96,14	14.930.859,00	Terlaksananya Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	Laboratorium	1	1	100	Pelayanan pengujian maupun sertifikasi di UPTD PMHP masih manual/offline, fasilitasi ruang pelayanan yang juga kurang memadai, sehingga belum bisa memberikan pelayanan prima bagi pelanggan	Mengajukan anggaran pelayanan, untuk pengadaan website, peralatan media online, dan pengadaan ruang pelayanan (dana masih minim) ditahun 2021

55	03.01.27.002	Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	30.673.720,00	30.673.720,00	100	0,00	Terlaksananya Pendayagunaan Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Jasa Kelautan	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik	Lokasi	3	3	100		
56	03.01.27.003	Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	127.000.000,00	126.082.420,00	99,27	917.580,00	Terlaksananya Operasional Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan konservasi yang dikelola	Lokasi	2	2	100		
57	03.01.27.004	Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	157.064.000,00	122.504.000,00	77,99	34.560.000,00	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai peraturan	Lokasi	10	5	50		
58	03.01.27.005	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perairan dan Keanekaragaman Hayati	4.290.200,00	4.290.200,00	100	0,00	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Perairan dan Keanekaragaman Hayati	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan	Dokumen	1,00	1,00	100		

Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

Secara umum, realisasi masing-masing program yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan cukup baik, dapat dilihat dari realisasi keuangan rata-rata yang diatas 90%. Kegiatan secara umum dapat terealisasi dengan baik dan mendukung pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan di Renstra DKP 2019 – 2024.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.727.116.555	3.433.058.098	92,11	294.058.457
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	451.662.000	417.509.381	92,43	34.152.619
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	0	0	0	0
4.	Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	97.452.830	88.258.600	90,56	9.194.230
5.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	256.086.170	256.017.300	99,97	68.870
6.	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.263.643.600	1.254.028.932	99,23	9.614.668
7.	Pengembangan Perikanan Tangkap	3.848.742.360	3.634.822.894	94,44	213.919.466
8.	Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	619.280.435	609.102.550	98,35	10.177.885

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
9.	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	517.831.396	490.630.598	94,74	27.200.798
10.	Pengelolaan Ruang Laut	702.895.920	602.033.800	85,65	100.862.120

Evaluasi Capaian Renstra Tahun 2020

Program dan kegiatan yang sudah ditetapkan masing-masing mendukung capaian indikator kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra DKP 2019 – 2024.

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Target Capaian Indikator Sasaran 2020	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan				
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 (360.535)	78,53 (298.532)
		Produksi Perikanan Tangkap	188.790,08	144.638,00 (76,61%)
		Produksi Perikanan Budidaya	171.745,70	153.893,58 (80,42%)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (19.859 ton)	88,1% (17.487,8 ton)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama				
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	80	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu : **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Sedangkan Misi pembangunannya adalah :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu **Program Nelayan Berjaya**, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
- e. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

dan sentra pertambakan.

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian **Misi ke 5 Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat berbasis Pertanian dan Wilayah Perdesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan** serta **Misi ke 6 Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama.**

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha. Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diprioritaskan untuk mendukung Misi ke 5 tersebut yaitu:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan
4. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-6, dilakukan melalui Pengarustamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) khususnya Tujuan ke 14, Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan alokasi ruang laut yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup serta

didukung pelaksanaan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Untuk melaksanakan Misi ke 6 tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan program:

- a. Program Pengelolaan Ruang Laut
- b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2.3. Isu-isu Penting yang terkait dengan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Sektor kelautan dan perikanan dalam kawasan regional telah berkembang pesat kendati memiliki peluang dan tantangan. Apalagi hal ini dibarengi dengan tingginya permintaan yang terus tumbuh secara cepat untuk komoditi perikanan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk. Sektor perikanan dapat memainkan peran penting dalam memenuhi tuntutan baru. Terlebih Provinsi Lampung dan kawasan lautnya termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yaitu alur keluar masuknya kapal- kapal baik dari dalam maupun keluar negeri melalui Selat Sunda. Namun disisi lain, sektor ini juga mengalami tantangan antara lain :

1. Pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
2. Rencana kerja untuk memperkuat pengembangan dan pengelolaan perikanan,
3. Pemberantasan *Illegal-Unreported-Unregulated* (IUU) *fishing*,
4. Penguatan ketahanan pangan melalui intervensi perikanan,
5. Mempromosikan produksi pangan yang berkelanjutan melalui teknologi perikanan yang berkelanjutan dan
6. Dampak perubahan iklim terhadap perikanan dan akuakultur.

Tantangan diatas diimbangi dengan peluang yang ada :

1. Adanya landasan hukum yang kuat terkait pembangunan kelautan perikanan, antarlain :
 - a. UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan;
 - c. UU No 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Provinsi Lampung memiliki wilayah perairan dan potensi perikanan darat dan laut yang masih belum termanfaatkan secara optimal;

3. Provinsi Lampung dalam membangun daerahnya menuju masyarakat yang maju dan sejahtera akan sangat mengandalkan pembangunan berbasis kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan berdampak pada meningkatnya pola konsumsi ikan masyarakat.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan.

Berdasarkan hasil penyerapan usulan dari pemangku kepentingan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, beberapa usulan/ isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan usulan program dan kegiatan tahun 2020 antara lain:

1. Revitalisasi tambak ex Dipasena dan rencana pengembangan Provinsi Lampung menjadi lumbung udang nasional. Pemerintah pusat melalui kementerian dan BUMN terkait mulai mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk mendukung revitalisasi. Oleh karena itu, Provinsi Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga perlu memfasilitasi melalui alokasi kegiatan dan anggaran baik yang bersifat percepatan, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi maupun bantuan langsung.
2. Permasalahan sampah di wilayah pesisir mendapat perhatian khusus dari Bapeda agar ditindaklanjuti oleh OPD terkait, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan. Permasalahan sampah yang terakumulasi di wilayah perairan Provinsi Lampung khususnya Teluk Lampung, harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan karena wilayah perairan sejatinya mendapat imbas dari kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah daratan.
3. Permasalahan stunting di Provinsi Lampung juga perlu mendapat perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan karena beberapa lokasi/ desa yang terindikasi stunting masuk dalam desa pesisir/ desa perikanan. DKP juga diharapkan melakukan intervensi melalui peningkatan konsumsi ikan/ kampanye Gerakan Gemar Makan Ikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012. Melalui industrialisasi kelautan dan perikanan, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Renstra KKP	Renstra Dinas
<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap pertumbuhan Ekonomi Nasional; • Meningkatkan kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; • Meningkatkan pendapatan. 	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan budidaya; • Optimalnya produksi perikanan tangkap • Meningkatnya kualitas kelompok masyarakat pesisir; • Meningkatnya kawasan budidaya laut, air payau dan tawar; • Kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang maju dan

	sejahtera.
<p>Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; • Meningkatkan branding produk perikanan dan <i>market share</i> dipasar luar negeri; • Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. 	<p>Mewujudkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan hasil kelautan dan perikanan meningkat
<p>Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan; 	<p>Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan yang ditandai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan meningkat; • Kelompok masyarakat pengawas
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil; • Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparat pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • perikanan meningkat; • Berkurangnya tingkat pelanggaran.

Penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan kelautan meliputi industri kelautan seperti perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral yang dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Posisi Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung

Deskripsi mengenai posisi sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung dibahas dengan mempertimbangkan penetapan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bisnis inti Provinsi Lampung, tujuan pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan Lampung dan peraturan perundangan yang mendukung pengembangan ke Kelautan dan Perikanan Lampung. Dalam hal ini penetapan Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu bisnis inti merupakan hal utama untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan Lampung yang didukung dengan segenap peraturan yang ada.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan visi-misi, renstra SKPD yang lalu, RTRW dan lain-lain, maka dapat dihimpun isu strategis kelautan perikanan tersebut menjadi komponen SWOT yang secara sistematis dikelompokkan dalam komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan (STRENGTH)	Kelemahan (WEAKNESS)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan posisi geografis yang strategis 2. Dukungan regulasi kelautan dan perikanan yang ada, al: Perda RZWP3K, Perda Perlindungan Nelayan 3. Masuk dalam prioritas 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur 2019-2024 4. Hasil dan produk kelautan perikanan yang sudah ada 5. Dukungan anggaran yang sudah ada (APBN dan APBD) 6. Keberadaan 3 UPT Pusat untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung 7. Terbentuknya kelembagaan Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah 2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik aparatur maupun pelaku usaha 3. Lemahnya data kelautan dan perikanan serta informasi akses pasar 4. Lemahnya aplikasi teknologi budidaya terkini, efisiensi pakan dan penerapan standar CBIB 5. Rendahnya mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap 6. Pengurusan dokumen perikanan kapal masih tergantung pada intitusi lain (KSOP) 7. Lemahnya pemanfaatan bioteknologi/potensi kelautan non konsumsi
Peluang (OPORTUNITY)	Ancaman (THREAT)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya sistem teknologi informasi dan industri 4.0 2. Meningkatnya permintaan produk hasil perikanan 3. Akses pasar bebas masyarakat ekonomi Asean 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan budidaya dan industri pengolahan negara-negara Asean 2. Dampak perang dagang US – China dan perlambatan ekonomi global 3. Serangan penyakit dan penurunan daya dukung

4. Berkembangnya permintaan produk non konsumsi dan ekspor ikan hias	lingkungan
5. Pengembangan kawasan konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	4. Perubahan iklim
6. Perubahan regulasi di level pusat	5. IUU Fishing
7. Pengembangan budidaya lobster dan komoditas ekonomis bernilai tinggi lainnya	6. Pencemaran dan sampah pesisir
	7. Adanya konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut

Berdasarkan analisis SWOT dari isu-isu strategis tersebut di atas maka terdapat beberapa strategi yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019 -2024 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

Arah Kebijakan:

1. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
2. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

2.Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan

Arah Kebijakan:

1. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
2. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan

3.Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya

Arah Kebijakan:

1. Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Renstra 2019 -2024 juga memperlihatkan pengarusutamaan dari:

1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Implementasi SDGs (Goal 14), meningkatkan luasan kawasan konservasi perairan yang dikelola.

2.Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (PPRB); Penyelarasan Renja tahunan dengan Pergub No.164 thn 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung

3.Stunting; Prioritas daerah rawan stunting untuk kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi anak sekolah dan ibu hamil, meningkatkan angka konsumsi ikan masyarakat

4.Penanggulangan kemiskinan; Penyelarasan lokasi dan sasaran kegiatan/ bantuan pada rumah tangga miskin yang berpotensi

5.Gender; Meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan
- 2) Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut

Lebih lanjut pencapaian tujuan tersebut dapat diukur dengan memonitor perkembangan indikator kinerja perangkat daerah yang ditargetkan pada akhir periode ini di tahun 2022.

Tabel. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	2022
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB subsektor Perikanan	Presentase Pencapaian Produksi Perikanan	100
		Presentase pencapaian ekspor perikanan	100
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Presentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	90

Sasaran Strategis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan

- 1.1 Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya
 - a. Meningkatnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan dengan arah kebijakan: Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan; dan Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
- 1.2 Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan
 - a. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dengan arah kebijakan: Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan; Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan

Tujuan: Meningkatkan Indeks Kualitas Air Laut

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan arah kebijakan: Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan ; dan Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

3.3. Rumusan Program dan Kegiatan

Untuk merealisasikan Misi dan Kebijakan tersebut di atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah menjabarkan dalam bentuk Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan Program ini meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah serta tercapainya administrasi keuangan yang sistematis dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dengan adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil ke provinsi, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, maka pengelolaan ruang laut khususnya wilayah perairan 0-12 mil sepenuhnya menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi OPD untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan didalamnya. Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pengelolaan ruang laut sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
 - Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program Pengembangan Perikanan Tangkap adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai), peningkatan pendapatan nelayan, dan peningkatan Nilai Tukar Nelayan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
3. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10GT sampai dengan 30GT
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30GT
4. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan

5. Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai dengan 30 GT
Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tujuan program Pengembangan Budidaya Perikanan adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perikanan budidaya (keamanan pangan). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, beberapa kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/kota

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan

di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi

5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Selain pengelolaan wilayah perairan 0-12 mil, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, kewenangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga dilimpahkan sepenuhnya kepada provinsi. Hal ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab dan tantangan besar bagi provinsi mengingat keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pengawasan yang dimiliki bila harus mengawasi seluruh wilayah yang menjadi kewenangan provinsi. Oleh karena itu, strategi pengawasan terpadu dan terintegrasi dengan stakeholder terkait menjadi prioritas, didukung dengan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas dan patroli bersama.

Rincian kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten./kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten./kota dalam 1

Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya.
Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi

6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah mewujudkan produk perikanan bermutu yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, dengan sasaran peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan volume produk olahan, peningkatan rata-rata konsumsi ikan nasional, peningkatan nilai produk non konsumsi pada tingkat pedagang besar, dan peningkatan nilai investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan berperan aktif dalam mengurangi permasalahan stunting dan pemenuhan gizi sumber protein masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan dan sub kegiatan utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka

menghasilkan Produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing

3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/distribusi ikan Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

BAB IV.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Agenda dan Prioritas

1. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur infrastruktur yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan produksi perikanan.
3. Percepatan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, mutu dan keamanan produk hasil perikanan.

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022

1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
2. Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
7. Mengembangkan Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM; dan terakhir
8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
PROVINSI LAMPUNG**

PD: DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			TARGET KINERJA	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan								
03:25:01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%		25.897.819.500			100%	25.997.819.500
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	100%		225.000.000				225.000.000
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Rencana aksi, Rencana Kinerja tahunan, Identifikasi resiko program/ kegiatan (SPIP))	5 dokumen	Bandar Lampung	75.000.000	APBD		5 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	Provinsi Lampung	75.000.000	APBD		3 Kegiatan	75.000.000
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja (Laporan Kinerja, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Rencana Aksi, PK, dan LPPD/LKPJ)	6 dokumen	Provinsi Lampung	75.000.000	APBD		6 dokumen	75.000.000

3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan	1 dokumen	1 dokumen	19.882.819.500			1 dokumen	19.882.819.500
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	1 tahun	Bandar Lampung	19.757.819.500	APBD		1 tahun	19.757.819.500
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	1 dokumen	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran PD	17 dokumen	Bandar Lampung	75.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan BMN	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000			1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 dokumen	20.000.000
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (orang)	100%	100%	195.000.000			100%	195.000.000
3.25.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	150	Bandar Lampung	75.000.000	APBD			75.000.000
3.25.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (orang)	6 orang	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		6 orang	50.000.000
3.25.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan serta pembinaan budaya kerja (kali)	6 kali	Bandar Lampung	30.000.000	APBD		5 kali	30.000.000
3.25.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 kali	Bandar Lampung	40.000.000	APBD		4 kali	40.000.000
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	100%		2.600.000.000			100%	2.650.000.000
3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Waktu Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Bandar Lampung	40.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000
3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah UPTD yang disediakan operasionalnya	1 UPTD	UPTD LPPHP, Bandar Lampung	350.000.000	APBD		1 UPTD	400.000.000
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Bandar Lampung	20.000.000	APBD		1 Tahun	20.000.000

3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan publikasi dalam media cetak	1 Tahun	Bandar Lampung	25.000.000	APBD		1 Tahun	25.000.000
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah waktu pengadaan ATK, bahan kebersihan dan pameran yang disediakan	1 Tahun	Bandar Lampung	80.000.000	APBD		1 Tahun	80.000.000
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Waktu Penyediaan Layanan Makan dan Minum	1 Tahun	Bandar Lampung	40.000.000	APBD		1 Tahun	40.000.000
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu penyediaan perjalanan dinas koordinasi, konsultasi, pembinaan dan monev lingkup OPD	1 Tahun	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	2.000.000.000	APBD		1 Tahun	2.000.000.000
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun		300.000.000			1 tahun	300.000.000
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin kantor (unit)	10 unit	Bandar Lampung	150.000.000	APBD		10 unit	150.000.000
3.25.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	10 unit	Bandar Lampung	150.000.000	APBD		10 unit	150.000.000
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun		2.075.000.000			1 tahun	2.075.000.000
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 tahun	Bandar Lampung	475.000.000	APBD		1 tahun	475.000.000
3.25.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Layanan perbaikan peralatan kerja yang disediakan	1 tahun	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Layanan umum kantor yang disediakan	1 tahun	Bandar Lampung	1.550.000.000	APBD		1 tahun	1.550.000.000
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun		600.000.000			1 tahun	650.000.000
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Penyediaan Pajak dan Perizinan, Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Bandar Lampung	300.000.000	APBD		1 tahun	350.000.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	1 tahun	Bandar Lampung	200.000.000	APBD		1 tahun	200.000.000
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Layanan Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Bandar Lampung	100.000.000	APBD		1 tahun	100.000.000

3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)	85		1.400.000.000			85	1.450.000.000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3 kegiatan					3 kegiatan	
3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan aturan pelaksanaannya yang diterbitkan (dokumen)	2 dokumen	Bandar Lampung, Pesisir Barat	300.000.000	APBD		2 dokumen	300.000.000
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (ha)	231.467	Pesisir Barat dan Tanggamus	100.000.000	APBD / DAK		231.467	100.000.000
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau dan/atau kawasan konservasi yang direhabilitasi	2 lokasi	Pesisir Provinsi Lampung	300.000.000	APBD / DAK		1 lokasi	300.000.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dilakukan	2 kegiatan		200.000.000			2 kegiatan	200.000.000
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 kegiatan					1 kegiatan	
3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Dokumen Persyaratan dan Prosedur yang diterbitkan	2 dokumen		100.000.000			2 dokumen	100.000.000
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan (dokumen)	10	Bandar Lampung	50.000.000	APBD		10	50.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	2 kegiatan					2 kegiatan	
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terkelola dengan baik (lokasi)	4 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan Tulang Bawang	150.000.000	APBD / DAK		4 lokasi	200.000.000

3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan	5 kali	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	200.000.000	APBD		5 kali	200.000.000
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	193.509,84		6.350.000.000			193.509,84	6.435.000.000
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil							
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	1 dokumen		300.000.000			1 dokumen	300.000.000
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang disediakan	100 unit	100 unit	750.000.000	APBD		100 unit	750.000.000
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	1500 orang		400.000.000			1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan mendukung Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan							
3.25.03.1.02.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah dokumen data SDI yang tersedia (dokumen).	1 dokumen	14 Kab/Kota	400.000.000	APBD		1 dokumen	400.000.000
3.25.03.1.02.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana dan prasarana nelayan yang diberikan	100 unit		500.000.000			100 unit	500.000.000
3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah nelayan/ kelompok yang meningkat kompetensinya/ mendapat asuransi (orang)	1500 orang	14 Kab/Kota	400.000.000	APBD	Asuransi Nelayan	1500 orang	400.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kegiatan mendukung Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	2 kegiatan					2 kegiatan	

3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap unuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT samapi dengan 30 GT	Jumlah dokumen persyaratan dan prosedur izin Usaha Perikanan Tangkap yang disusun/ ditetapkan	1 dokumen		75.000.000			1 dokumen	75.000.000
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap unuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT samapi dengan 30 GT	Jumlah nelayan yang dibina/dilayani dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap (lokasi)	1000 Nelayan	Provinsi Lampung	100.000.000	APBD		1000 Nelayan	30.000.000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Pelabuhan Perikanan Provinsi yang dikelola	4 pelabuhan					4 pelabuhan	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan dan TPI yang dibina (Pelabuhan)	9 pelabuhan	7 Kab/Kota Pesisir Provinsi Lampung	100.000.000	APBD		9 pelabuhan	100.000.000
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan yang ditata/ dibangun sarannya (pelabuhan)	2 lokasi	PPP Lempasing, Bandar Lampung dan PPP Kota Agung, Tanggamus	1.000.000.000	APBD / DAK		2 lokasi	1.000.000.000
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil I yang dikelola (UPTD)	1 PPP	PPP Lempasing, Bandar Lampung	2.250.000.000	APBD		1 PPP	2.400.000.000
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil II yang dikelola (UPTD)	2 PPP	PPP Labuhan Maringgai, Lampung Timur dan PPP Teladas, Tulang Bawang				2 PPP	
		Jumlah UPTD Pelabuhan Perikanan Wil III yang dikelola (UPTD)	1 PPP	PPP Kota Agung, Tanggamus				1 PPP	
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT								
3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT samapi dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT samapi dengan 30 GT	100 Nelayan	Provinsi Lampung	75.000.000	APBD		120 Nelayan	80.000.000

3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	205.040,53		4.925.000.000			205.040,53	4.925.000.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Sahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		10 dokumen						
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen persyaratan dan prosedur izin Usaha Perikanan Budidaya yang disusun/ ditetapkan	1 dokumen		100.000.000			1 dokumen	100.000.000
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasin izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	30	Provinsi Lampung	75.000.000	APBD		30	75.000.000
3.25.04.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Data, Statistik dan Informasi Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	1 dokumen		100.000.000			1 dokumen	100.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut								
3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut/Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan (dokumen)	1	Provinsi Lampung	200.000.000	APBD		1	200.000.000
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah bantuan sarana dan prasarana yang diberikan (paket)	4	Pesawaran dan Lampung Selatan	750.000.000	APBD / DAK		4	750.000.000
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembenihan yang dibangun/ diberikan (paket)	3	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur	500.000.000	APBD / DAK		3	500.000.000
3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah UPTD Balai Benih Ikan yang dibiayai operasionalnya (UPTD)	1	BBIS Purbolinggo, Lampung Timur, Provinsi Lampung	2.000.000.000	APBD / DAK		1	2.000.000.000

3.25.04.1.05.05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang disediakan (unit)	1	Provinsi Lampung	1.000.000.000	APBD / DAK	1	1.000.000.000
3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan monitoring yang dilaksanakan (kegiatan)	15	Provinsi Lampung	100.000.000	APBD	15	100.000.000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina/ meningkat kompetensinya (pembudidaya)	30	Bandar Lampung	100.000.000	APBD	30	100.000.000
3.25.05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	100		1.280.000.000		100	1.305.000.000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil							
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan (%)	100	Provinsi Lampung	80.000.000	APBD / DAK	100	80.000.000
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Tersedianya Operasional Kapal Pengawasan mendukung patroli laut (unit)	2 unit	Perairan 0-12 mil, Provinsi Lampung	800.000.000	APBD	2 unit	800.000.000
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 MIL	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	60 unit	Provinsi Lampung	80.000.000	APBD	60 unit	75.000.000
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah pokmaswas yang dibina (pokmaswas)	21 pokmaswas	14 Kab/Kota	200.000.000	APBD / DAK	21 pokmaswas	200.000.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							

3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Kab/kota yang di pantau/ diawasi (kab/kota)	7 kab/kota	7 kab/kota	60.000.000	APBD		7 kab/kota	75.000.000
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang di pantau/ diawasi (unit)	60 unit	Provinsi Lampung	60.000.000	APBD		60 unit	75.000.000
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)	21.845.742		2.075.000.000			21.845.742	2.075.000.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3.25.06.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen persyaratan dan prosedur izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan yang disusun/ ditetapkan	1 dokumen		100.000.000				100.000.000
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha budidaya ikan yang diterbitkan rekomendasin izinnya / dilakukan pembinaan (kelompok)	15	Bandar Lampung	75.000.000	APBD		10 dokumen	75.000.000
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen potensi investasi/ promosi yang disusun (dokumen)	2 dokumen	Bandar Lampung	200.000.000	APBD		2 dokumen	200.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar								
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi sesuai persyaratan/ meningkat kompetensinya (orang)	30 orang	Bandar Lampung	150.000.000	APBD		30 orang	150.000.000

3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah produk, TPI, pasar, kualitas air, pakan ikan, residu antibiotik yang terpantau	330 sampel	Provinsi Lampung	450.000.000	APBD		350 sampel	450.000.000
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi								
3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Pemantauan yang dilaksanakan	15 Kegiatan	UPTD LPPHP, Provinsi Lampung	250.000.000	APBD		15	250.000.000
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bantuan sarana, prasarana dan paket makanan yang diberikan (paket)	510 paket	Provinsi Lampung	750.000.000	APBD		610 paket	750.000.000
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen data dan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan (dokumen)	1 dokumen	Bandar Lampung	100.000.000	APBD		1	100.000.000
				TOTAL	41.927.819.500				42.187.819.500

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung guna mendukung pembangunan daerah khususnya dibidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Rencana Kerja Tahun 2022 telah memprogramkan kegiatan-kegiatan prioritas untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama khususnya dalam peningkatan produksi dan konsumsi ikan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan masukan saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan di Provinsi Lampung, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. LIZA DERNI, M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19680812 199903 2 003